

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Agustri dan Amiruddin Sijaya, 2021, *"Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia"*, Samudra Biru, Yogyakarta;
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2020, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta;
- Bambang Waluyo, 2018, *"Penegakan Hukum Di Indonesia"*, Sinar Grafika, Bandung;
- Barda Nawawi Arif, 2016, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, Citra Aditya Bhakti, Bandung;
- Bawaslu, 2019, *"Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019"*, Bawaslu RI, Jakarta;
- Cholid Narbuko, dkk, 2015, *"Metodologi Penelitian"*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Dijan Widijowati, 2018, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Andi Offset, Yogyakarta;
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *"Penelitian Hukum (Legal Research)"*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *"Pengantar Hukum Pemilihan Umum"*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta;
- Ishaq, 2017, *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi"*, Alfabeta, Bandung;
- Ishaq, 2018, *"Pengantar Hukum Indonesia (PHI) Edisi 1 Cetakan Ke-5"*, Rajawali Pers, Depok;
- Jonathan Sarwono, 2018, *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*, Suluh Media, Yogyakarta;
- Kadri Husen dan Budi Rizki Husin, 2016, *"Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Laurensius Arliman S, 2015, *"Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat"*, Budi Utama, Yogyakarta;
- Moh. Nazir, 2017, *"Metode Penelitian"*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

- Morissan, dkk, 2012, "*Metode Penelitian Survei*", Kencana, Jakarta;
- P.A.F. Lamintang, 2014, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 2012, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 2018, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Rajawali Pers, Depok;
- Sri Mamuji, 2015, "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*", BP FHUI, Jakarta;
- Sudarto, 2013, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2016, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*", PT. Alfabeta, Bandung;

B. Jurnal:

- Andi Setiawan, 2020, "*Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak*". Jurnal Academia Praja, Volume 3 Nomor 02, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi.
- Angelo Emanuel Flavio S, 2017, "*Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*", Legal Spirit Journal, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang, Malang;
- Benyamin Buntu, 2022, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkundu): Studi di Kota Makassar*", Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar;
- Harris Y.P Sibuea, 2024, "*Efektivitas Hukum Kewenangan Bawaslu Atas Penindakan Pidana Pemilu*", Info Singkat, Volume XVI Nomor 3, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta Pusat;
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, "*Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;

Marseno, 2019, "*Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*", Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo;

Muhammad Nur Ramadhan, 2019, "*Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019*", Jurnal Adhyasta Pemilu, Volume 2 Nomor 2, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta;

Parlin Azhar H, dkk, 2021, "*Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum*", Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Universitas Darma Agung, Medan.

Syafrizal, dkk, 2023, "*Problematisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota*", Otentik Law Journal, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi;

Yandi, 2021, "*Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu*", Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang, Pangkalpinang;

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengaturan administratif terkait bahan kampanye dan alat peraga kampanye;

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

D. Internet:

Arum Sutrisni Putri, “*Wawancara*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses pada tanggal 07 Mei 2024.

Bawaslu, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada tanggal 07 Mei 2024.

Darma Indo Damanik, “*Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu*”, <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-penyelesaian-tindak-pidana-pemilu.html>, diakses pada tanggal 07 Mei 2024.